----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran ----- Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau ----- jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar ----- wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 16-12-2014 (enam belas Desember dua ribu empat belas) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal --- 23-12-2014 (dua puluh tiga Desember dua ribu empat belas) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang :-----
 - a. Perdagangan ;-----
 - b. Pengembang atau developer ; -----
 - c. Pembangunan ; -----
 - d. Pemberian Jasa ; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut : -----

1. REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA -----

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan ----- rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. ----- Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk --- dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung ----- tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa ----- pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal ---- untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. -----

2. PENYIAPAN LAHAN -----

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan ----- konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, ----- pekerjaan sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, - seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, ----- pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran ----- drainase. Kegiatan yang termasuk pada kelompok ini antara lain, ----- seperti pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, ----- pembukaan lahan (penggalian, pengurukan, perataan lahan ----- konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau ----- peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan -----

pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi ----
atau keperluan sejenis, persiapan lahan untuk penambangan meliputi
pemindahan timbunan dan pengembangan serta persiapan lahan dan
properti mineral, tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan
minyak dan gas. Termasuk pembangunan lahan drainase dan -----
pengeringan lahan pertanian atau kehutanan. -----

3. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai ---
untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan ----
kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal -
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual
dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal. -----

4. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai ---
untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk
pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh -----
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

5. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai ---
untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan ---
perubahan dan renovasi gedung industri. -----

6. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh ----- perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

7. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas ---- dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi --- gedung kesehatan. -----

8. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan ----- perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----

9. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk ----- kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. -----

10. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan ----- gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan ----

untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat -----
hiburan dan olahraga. -----

11. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai ---
untuk penggunaan selain dalam Kelompok Konstruksi Gedung -----
Tempat Tinggal sampai dengan Konstruksi Gedung Tempat Hiburan -
dan Olahraga, seperti tempat ibadah, terminal/atau stasiun, -----
bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya. -----
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

12. PEMBONGKARAN -----

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran ----
atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya.
Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan ----
gas. -----

13. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan ---
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen -----
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan -----
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; -----
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; -----
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan ---
jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah -
agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan -----

sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program - akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -- perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. -----

14. REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar ---- balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real ---- estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara ----- pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau ----- kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real --- estat. -----

15. HOTEL BINTANG LIMA -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan ----- penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan ----- menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola --- secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai ----- hotel bintang lima (termasuk lima berlian) yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya. -----

16. HOTEL BINTANG EMPAT -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan ----- penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan ----- menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola ----

secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai ----
hotel bintang empat yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi --
yang membinanya. -----

17. HOTEL BINTANG TIGA -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan -----
penginapan, makan minum serta jasa lainnya bagi umum dengan -----
menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. Usaha ini dikelola ----
secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan sebagai ----
hotel bintang tiga yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi ----
yang membinanya. -----

18. APARTEMEN HOTEL -----

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan -----
penginapan bagi umum yang mengelola dan menfungsikan -----
apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan
perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. -----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, -----
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung dalam rangka ----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk : -----

a. Jasa: -----

1. PERIKLANAN -----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik -----
dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa --
bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, -----
perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk -----

seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah -- dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan - dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, --- panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil - dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan - udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau --- contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan ----- tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan - jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan ----- (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran. -----

2. AKTIVITAS ARSITEKTUR -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi ----- arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, -- jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, -- jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, termasuk jasa ---- inspeksi gedung atau bangunan. -----

3. AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI -

Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik dan ----- konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek - yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; -----

perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik -- listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, ----- teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek ----- manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek yang berkaitan -- dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik -- akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei - seismik atau gempa bumi; kegiatan survei geodetik meliputi ----- kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan - di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan ----- kartografi termasuk kegiatan pemetaan. -----

4. AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN -----

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti --- pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti --- tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk ----- pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ----- ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik ----- atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika menjadi satu ----- kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. - Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. -----

5. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan ---- dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan ----- manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; - keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan ----- pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya ----- manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. -- Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, ----- bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada ----- bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan ----- prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur ----- pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan --- untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, ----- pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi ----- manajemen dan lain-lain. -----

6. AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA ----

YTDL -----

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik ---- lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa ----- konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, ----- konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan ----- arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau -----

perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam ---
pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya
atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan -----
(sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, -
dengan publiser, produser dan lain-lain. -----

7. AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR -----

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara -----
langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran
air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan ----
dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini -----
termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti -----
pedagang air pikulan/atau dorongan/atau mobil tangki. -----

8. AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI -----

LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan -----
eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, -----
toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta -----
bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, -----
kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan
jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku -
bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa
atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa -----
pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan -
mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang -----

dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk -----
tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa -----
pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa -----
pembersihan bangunan dan industri lainnya. -----

9. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) -----

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah ---
dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat ---
tinggal maupun bukan tempat tinggal. Termasuk kegiatan -----
pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air. -----

10. RESTORAN -----

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat -
di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan --
menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat -----
usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/atau perlengkapan ---
untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan ----
telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/atau rumah -
makan dari instansi yang membinanya. -----

11. AKTIVITAS KEHUMASAN -----

Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi untuk ---
membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan -----
bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik
yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal. -----

12. AKTIVITAS JALAN TOL -----

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan lalu lintas -----
kendaraan melalui jalan atau jembatan tol. -----

**13. PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK -----
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA -----**

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan -
prafabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan
sipil lainnya (kegiatan subgolongan Konstruksi Bangunan Sipil -----
Lainnya) sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam -----
konstruksi sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak. ----

b. Perdagangan: -----

**1. PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG -----
YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU --
DI SUPERMARKET/ATAU MINIMARKET -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis
barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/atau makanan,
minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan ----
serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self
service/atau swalayan). Di samping itu juga dapat menjual -----
beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah
tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya -----
supermarket atau minimarket. -----

**2. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI ---
SPBU -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar - untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), ---- termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. ----- Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan ---- barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. ----- Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini. ----- Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok ---- Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan ----- Produk yang berhubungan dengan itu. Perdagangan eceran LPG - dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas ----- dimasukkan dalam kelompok Perdagangan Eceran Gas Elpiji. -----

3. PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus ----- premium, premix dan solar yang dilakukan di kios/atau toko ----- Perdagangan eceran Avtur, Premium, Premix dan Solar untuk ----- bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU.

4. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL ----- BANGUNAN -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan ---- lain-lain. -----

5. PERDAGANGAN BESAR KACA -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca ----- lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca ----- lembaran berukir. -----

6. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN -- SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU ----- KACA -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu - bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin ---- dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, ----- kloset, eternit, pipa irigasi dan buis. -----

7. PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU --

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland ---- putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen ----- portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, --- batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus ----- mosaik. -----

8. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan -----
konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok -----
Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi -----
sampai dengan Perdagangan Besar Berbagai Macam Material -----
Bangunan, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik -----
lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis
dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar -----
pemanas air (water heater). -----

**9. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN ----
KONSTRUKSI -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai -----
macam baja/atau besi untuk bahan konstruksi seperti baja -----
tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa -----
besi/atauatau baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/atau baut,
engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling --
door, awning dan seng lembaran. -----

**10. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI -----
PORSELEN -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan -----
konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak
cuci, bak mandi dan ubin dinding. -----

11. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan -----
konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, --
tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/atau -----
jendela, daun pintu/atau jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu
lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip ----
board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton. -----

12. INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap
pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar). -----

13. INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN -

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan untuk -----
pelindung keselamatan, seperti pakaian pelindung dan pakaian ----
anti api, sabuk pengaman tukang kawat dan sabuk lain untuk -----
keperluan pekerjaan, pelampung, topi plastik yang keras (helm
bangunan) dan perlengkapan keamanan lainnya yang terbuat dari
plastik (helm olahraga dan segala macam helm sejenisnya), -----
pakaian pelindung kebakaran, tutup kepala pengaman dari logam -
dan peralatan pengaman pribadi lain yang terbuat dari logam, -----
penyumbat telinga dan hidung (misalnya untuk renang dan -----
pengaman hidung) dan masker gas. -----

14. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan -----
telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp 2.828.400.000.000,00 -----
(dua triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus juta -----
Rupiah) yang terbagi atas 28.284.000.000 (dua puluh delapan miliar dua --
ratus delapan puluh empat juta) saham, masing-masing saham bernilai ----
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah -----
8.318.823.600 (delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus --
dua puluh tiga ribu enam ratus) saham, masing-masing dengan nilai -----
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya sebesar Rp 831.882.360.000,00 (delapan ratus tiga ----
puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam -----
puluh ribu Rupiah), yang telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham -
dengan rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian ---
akhir akta ini. -----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----
ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar -----
Rp 831.882.360.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus
delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), merupakan ----
setoran lama, telah disetor oleh para Pemegang Saham Perseroan dengan
bentuk penyetoran sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 23, tanggal ----
30-08-2018 (tiga puluh Agustus dua ribu delapan belas) yang dibuat di -----
hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi

- Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0238714 tanggal -----
03-09-2018 (tiga September dua ribu delapan belas).-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"). -----
Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan ----
ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan -----
tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai -----
nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ---
perubahan/atau penggantinya (selanjutnya disebut "**UUPT**"), dan peraturan
-perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham -----
dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.-----
 5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam ---
bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut ----
wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain -----
yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat -----
dilakukan dalam penambahan modal untuk memperbaiki posisi keuangan. -
 6. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda --
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut: -----

- a). Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penysetoran ----
tersebut; -----
 - b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai ---
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa ----
Keuangan disebut "OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun ----
juga; -----
 - c). Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini. -----
 - d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan -----
dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar. -----
 - e). Dalam hal penysetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -----
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan ----
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar -----
di OJK.-----
7. Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan -----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), -----
atau dengan memberikan HMETD dengan memenuhi syarat-syarat dan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang pasar modal dan anggaran dasar ini. -----
8. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; -----

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham ----- atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan: -----

- a). memberikan HMETD yaitu hak yang melekat pada saham yang ----- memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan ----- untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang --- dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak ----- untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain; -----
- b). pengeluaran saham/atau penambahan modal dengan HMETD atau-- tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai ----- dengan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----
- c). pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang -- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang ----- mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh - Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah ----- menyetujui pengeluaran Efek tersebut. -----
- d). Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang ----- sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat - untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ----- lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.-----
- e). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, ----- dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan ----

- perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia.-----
- f). Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -----
diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam butir d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ---
Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu ---
yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-----
syarat yang sama.-----
- g). Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang -----
penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan
nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal -----
dimaksud wajib terdapat pembeli siaga yang menjamin untuk -----
membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling ---
rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat ---
Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.----
- h). Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ---
sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang --
diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban -----
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- i). Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/ataupenambahan modal tanpa ---
memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham:-----

- 1). Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau -----
- 2). Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang --
dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan ---
dengan persetujuan RUPS; dan/atauatau -----
- 3). Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -----
restrukturisasi yang telah disetujui RUPS; dan/atau -----
- 4). Dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal
yang memperbolehkan penambahan modal tanpa -----
HMETD.-----

9. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----
 - a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam
rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya. -----
 - b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal -----
Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima
persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----
Modal Dasar; -----
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;- -
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari -----

Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling ----
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau -----
penggantinya. -----

b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b butir 3 Anggaran ----
Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -----
harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga ----
Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal -
33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) -
bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b ----
butir 3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi; -----

b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---
ayat 9 huruf b butir 1 Anggaran Dasar ini termasuk juga -----
persetujuan untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 9 huruf b -----
butir 4 Anggaran Dasar ini. -----

c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal -----
Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang-----
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang -----
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai ----
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh ---
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar -----
penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ---
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, -----
sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum -----
sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang -
namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa --
orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara -----
tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka ----
bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar ---
Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah -----
dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan -----
mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas-----
saham-saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ----- RUPS, dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----
6. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -- kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam ---- RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai --- pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang ---- Pasar Modal, dan UUPT-----
8. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: -----
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif ----- pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan ----- wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau ---- surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. -----
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif ----- Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ----- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ----- Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan ----- dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ---- pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----- peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut ----- dicatatkan. -----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang -- pemegang saham.-----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ----- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----- menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi-- tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama ----- bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak ---- langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau ----- obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ---

- dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
5. Seluruh Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan ----
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ---
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal, dan UUPT.-----

----- **SURAT SAHAM PENGANTI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
- a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat
dilakukan jika: -----
- 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
- 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah -
memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan ----
nomor surat saham yang asli.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat-----
dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah--
pemilik surat saham tersebut; -----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----

memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi-----
Perseroan; dan-----

- d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ----
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan--- -
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender -----
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung -----
oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini juga
berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek -----
Bersifat Ekuitas.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-----
hal sebagai berikut: -----
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -
kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian. -----
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian ----
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -----

- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-----
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -----
terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian-----
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ---
Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi -----
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -----
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----

- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
 - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sista berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
 - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 - k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio ---
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;---
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain --
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ----
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi ----
Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----

- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -----
 untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
 sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif -----
 ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan ---
 Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening -----
 Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh-----
 masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-----
 Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang-----
 menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk -----
 memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk -----
 selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari ---
 kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang -----
 Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----
 hak-hak lainnya tersebut. -----
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan -----
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di -
 wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan ---
 dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara -----
 Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----
 Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----

- a. Nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga -----
 Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh -----
 pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----
 para Pemegang Saham;-----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak----
 gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan
 tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan
 fidusia tersebut; -----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham
 anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam-----
 Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang
 Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
 atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan
 tempat tinggal/atau alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan
 kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua
 surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham-----
 adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir
 dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat----- meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----- semua hak yang diberikan kepada Pemegang Saham berdasarkan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau----- pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. -----
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik -- bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai ----- pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai ----- pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham atas surat saham yang bersangkutan. -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar - ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya --- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ----- Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ----- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, ----- pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, ----- Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak--- dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas----- saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif ---- dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ----- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada ----- Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan

tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang -
berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan
untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham
dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar
ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham,
maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh
Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----
ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di ---

mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian-----
seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -----
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis-----
untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ---
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan --
dalam Anggaran Dasar ini. -----
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ----
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
tersebut dicatatkan.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 11**-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam -----
anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan --
setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -----
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan -----
OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka,
Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan

- Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham -----
 Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. -----
- Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS ----
 oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video -----
 konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.-----
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam)
 bulan setelah tahun buku berakhir.-----
 5. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain-----
 sebagaimana diatur pada ayat 4.-----
 6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu -----
 berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.-----
 7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
 8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas ----
 permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang
 saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12. -----
 9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan: -----
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 3 -----
 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai ----
 saldo laba positif; -----
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. -----
 10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor
 akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi -----
 keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPSP -----

- Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau ----
kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan -
rekomendasi komite audit. -----
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ----
publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan
mengenai:-----
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan -----
b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan ----
publik yang dapat ditunjuk.-----
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan ----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----
- 12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:** -----
- (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan:-----
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama----
sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar -----

- diselenggarakan RUPS; atau -----
- b. Dewan Komisaris. -----
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada –
butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat -----
disertai alasannya. -----
- (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang --
disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada
butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini harus: -----
- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus -----
diputuskan dalam RUPS; dan -----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar Perseroan.-----
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang-----
saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.-----
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan
surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari --
pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling-----

- lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana---
dimaksud pada butir (5) ayat ini . -----
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas-----
usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ---
huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) --
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.-----
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.-----
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat
ini.-----

- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka -----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal --
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris,
Dewan Komisaris wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang--
saham yang tidak diselenggarakan; dan-----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua--
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1)
huruf a ayat ini-----
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.-----
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, --
pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan -
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu -----

paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.-----

- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan ----- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:-----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan-Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana---- dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ----- belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada - pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ----- sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir --- (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.-----
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata----- acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini. -----

- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi-
sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini
dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan
prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ---
Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.-----
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada -
butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --
memuat juga informasi:-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ---
pemegang saham dan nama pemegang saham yang -----
mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan
RUPS atas permintaan pemegang saham;-----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah -----
kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ----
ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin -----
penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan -----
pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -----
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau---
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris -----
melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.-----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,-----
----- WAKTU PENYELENGGARAAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
-----DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN-----

----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di: -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan ----- sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan); -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;-----
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan. -----
4. **Prosedur Penyelenggaraan RUPS:** -----

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; -----
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan-----
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.-----
5. **Pemberitahuan RUPS kepada OJK:** -----

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ----
acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman RUPS. -----
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus ---
diungkapkan secara jelas dan rinci. -----
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (2) ayat ini , Perseroan wajib menyampaikan -----
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -
pemanggilan RUPS.-----

6. Pengumuman RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang --
saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----
tanggal pemanggilan melalui media sebagaimana diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang memuat:-----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata ----
acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.-----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham -

atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ---
12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, ----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, ---
wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS --
karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan -----
Komisaris.-----

- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh -----
Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman ---
RUPS wajib memuat juga keterangan:-----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan----
jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang -----
disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan-----
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam --
setiap rapat.-----

7. Usulan Mata Acara Rapat: -----

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara -----
tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) ----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat -ini

harus: -----

- a. dilakukan dengan itikad baik; -----
- b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
- d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan dan anggaran dasar.-----

(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari -----
pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi -----
persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan ---
butir (3) ayat ini. -----

8. Pemanggilan RUPS: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -----
penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS melalui media-----
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini --
paling kurang harus memuat informasi: -----
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---
tersebut; dan -----
- f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat-----
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya-----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-
- g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa
melalui e-RUPS.-----

9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua: -----

(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: -----

- (a) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu -----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh ---
satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----
- (b) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan -----
- (c) dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS -----
pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum -----
kehadiran.-----

- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka-
waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini,-----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----

10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga: -----

- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ----
atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.-----

- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari----- setelah RUPS kedua dilangsungkan.-----
- (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini ----- memuat paling sedikit:-----
- a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;-----
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan ----- kedua;-----
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;-----
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan-----
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.-----
- (4). RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum----- mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini. -----

11. Bahan Mata Acara Rapat: -----

- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi ----- pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----
- (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ----- sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

- (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur --- kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ----- ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, ----- penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan --- peraturan perundang-undangan lain tersebut.-----
- (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota ---- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan ----- diangkat wajib tersedia:-----
- a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ----- huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan ----- RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----
- (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan----- formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh ----- Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling - sedikit menyatakan bahwa:-----
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan -----

- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut-----
tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

12. Ralat Pemanggilan: -----

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat ----
perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini. -----
- (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir
(1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS ---
dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.-----
- (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ----
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan -----
karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa -----
Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku,-----
sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan
ulang.-----

13. Hak Pemegang Saham: -----

- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat -----
kuasa berhak menghadiri RUPS. -----
- (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalamdaftar pemegang ---

- saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS-----
- (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan -----
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:-----
- a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir -----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ----
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam
ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam
RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam -
daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan ulang RUPS.-----
- (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang -
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang --
saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini. -----
- (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (9) dan Pasal
11 ayat 12 butir (17), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13), daftar pemegang saham dapat -----

disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.-----

(7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ----- memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata ----- acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan ----- Perseroan.-----

(8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ---- mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS-----

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain - yang terkait dengan mata acara RUPS.-----

15. Pemberian Kuasa Secara Elektronik-----

(1). Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara --- elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan ---- suara dalam RUPS.-----

(2). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 ---- sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

(3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui ----- e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang -- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan --- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----

- (4). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini -- harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum ----- penyelenggaraan RUPS.-----
- (5). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- (6). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk----- pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika ----- pemegang saham mencantumkan pilihan suara.-----
- (7). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari -- kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- (8). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:-----
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;-----
 - b. Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau-----
 - c. Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.-----
- (9). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik --- sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini .-----
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini ---- wajib:-----
 - a. cakap menurut hukum; dan-----
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota DewanKomisaris, ---- dan karyawan Perseroan.-----

- (11). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini -- harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan ----- sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (12). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, -- wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama ---- pemberi kuasa dinyatakan batal.-----
- (13). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan -- sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan ----- berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh ---- Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan ----- perundang-undangan.-----
- (14). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia ----- e-RUPS.-----
- (15). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam ----- prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.-
- (16). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut -

dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan -----
perundang-undangan.-----

16. Penyedia e-RUPS-----

- (1) Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.-----
- (2) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan ----- pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.-----
- (3) Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.-----
- (4) Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.-----
- (5) Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:-----
 - a. Terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----- undangan;-----
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk --- dapat mengakses e-RUPS;-----
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;-----

- d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan --- kegiatan e-RUPS;-----
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;-----
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal ----- terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk ----- penambahan layanan dan fitur e-RUPS;-----
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ----- pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan,----- penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan ----- pengujian;-----
 - h. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di ---- wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari----- pusat data utama;-----
 - i. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, ----- pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan ---- sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;-----
 - j. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena----- kesalahan atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-----
- (6). Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik ----- dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, -- kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) --

ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.-----

- (7). Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.-----
- (8). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS - sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah -- memperoleh persetujuan OJK.-----
- (9). Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS----- sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling ----- sedikit:-----
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak----- akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan----- pendaftaran Pengguna e-RUPS;-----
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;-----
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;-----
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;-----
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;-----
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi -----
 - g. pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;-----
 - h. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka----- pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan;-----
 - i. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan ----- peraturan -perundang-undangan; dan-----

- j. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada -----
Pengguna e-RUPS. -----

17. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman -----

- (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan, melalui paling sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS;-----
 - b. situs web bursa efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan,-----dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----
bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----
- (2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (1) huruf c wajib memuat informasi yang -----
sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan -
Bahasa Indonesia. -----
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan--
dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada butir (2), informasi dalam Bahasa
Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----
- (4) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ----
Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, --
ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman -----

ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
sampai dengan ayat (3) pasal ini dilakukan melalui paling sedikit:-----

a. situs web bursa efek; dan-----

b. situs web Perseroan-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -----

bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.-----

-----**PIMPINAN DAN TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

----- **Pasal 13** -----

1. Pimpinan RUPS: -----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Dewan Komisaris. -----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.-----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi -
tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada butir
(1) dan (2) ayat ini, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris.-----

- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ---
ditunjuk oleh Direksi.-----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi -----
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas -----
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.-----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan,
RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan -----
Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang
hadir dalam RUPS.-----

2. Tata Tertib RUPS: -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan -----
kepada pemegang saham yang hadir.-----
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)
ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ----
penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; ----
dan -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -
pertanyaan dan/atau pendapat. -----

-----**KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN** -----

-----**RISALAH RAPAT, RINGKASAN RISALAH** -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Keputusan RUPS: -----

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -----

sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini tidak tercapai, -----

keputusan diambil melalui pemungutan suara. -----

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana -----

dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib dilakukan dengan -----

memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --

RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS: -----

(1). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara yang harus diputuskan dalam RUPS** :-----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ---

yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ----

ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari -----

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -

hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----

Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan ----- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika ----- dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari ----- jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili --- kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah ----- kuorum yang lebih besar. -----
- c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan - huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -- dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ----- hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan ----- menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh - jumlah suara setuju yang lebih besar. -----
- (2). Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ----- berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----- Perseroan. -----
- (3). Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) ayat ini berlaku---- juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk ----- mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha,

kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan -----
kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah -----
kekayaan bersih. -----

(4). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara perubahan anggaran dasar Perseroan: -----**

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara --
perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang -----
hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar ---
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, -
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum
yang lebih besar;-----

b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah -
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari ----
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -----
 $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan.-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana --
dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham -----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa -----
Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

(5). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara mengalihkan kekayaan Perseroan :** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara ---
mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% ---
(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, -----
pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran --

Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian ---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali -
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang ----
lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ---
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri -
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan -----
jumlah kuorum yang lebih besar;-----
- d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari --
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak -----
suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ----
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari ----
saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

(6). **Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen:** -----

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri
oleh Pemegang Saham Independen (yang dimaksud Pemegang -----
Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai
kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi --
tertentu dan a. Bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan ---
Komisaris, pemegang saham utama dan Pengendali; atau b bukan ---
merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, --
pemegang saham utama dan pengendali), dilaksanakan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, -----
kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum --
yang lebih besar; -----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen;-----
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ---
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri ---

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham -----
Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan ----
jumlah kuorum yang lebih besar; -----

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih --
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----
Independen yang hadir dalam RUPS;-----

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----
dilaksanakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham -----
Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan; dan-----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh ----
persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS. -----

**(7). Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara
perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari
1 (satu) klasifikasi saham: -----**

Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, -
RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya -----

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena -
dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi -----
saham tertentu, dengan ketentuan: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali -----
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum
yang lebih besar; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a--
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan-----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil-----
keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi
saham yang terkena dampak atas perubahan hak -----
tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar -----
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-
- c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf--
a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga ---
per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang ---
hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan
menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh
jumlah suara setuju yang lebih besar; dan-----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai,-----
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang-----
terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam-----
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang -----
ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.-----

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu ----
tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada --
klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas -----
Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil -
keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas ---
saham pada klasifikasi saham tersebut.-----

(8). Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang -----
hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang --
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -
suara. -----

(9). Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara -----
elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau -----
abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan
suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara -----

mayoritas pemegang saham.-----

- (10). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang ---
saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang --
saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang -----
kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan -----
suara yang berbeda.-----
- (11). anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan
dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam -----
pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui-----
e-proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima
kuasa. -----
- (12). Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan ---
Rapat menentukan lain. -----

3. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah -----
RUPS. -----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --
dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak ----
disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta -
berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK..-----

- (4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam ----- bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang ----- terdaftar di OJK. -----
- (5) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta ----- notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.-----
- (6) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib -- disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender - setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (7) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut ---- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
- (8) Dalam hal Perseroan menyampaikan Risalah RUPS melewati batas - waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (7) ayat ini penghitungan -- jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung - sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah ---- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini. -----
- (9). Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat - ini wajib memuat informasi paling kurang: -----
- a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu --- pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -- saat RUPS; -----

- c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat -- RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang ----- mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham -- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ---- terkait mata acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau - memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ---- saham diberi kesempatan; -----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak - setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika ----- pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; ----
 - h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan ----- pembagian dividen tunai. -----
10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ---- setelah RUPS diselenggarakan. -----
11. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) sampai dengan butir (10) ayat ini dan Pasal 12 butir (1) dan (2) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah-----

memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (13) dan penyelenggaraan-----
RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ----
11 ayat 12 butir (16). -----

4. **Ketentuan Lain-Lain:** -----

Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum -----
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ---
persetujuan RUPS, Perseroan wajib:-----

a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS ----
tersebut dalam RUPS terdekat. -----

b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a --
dalam laporan tahunan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu -----
diantaranya sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang berdomisili di Indonesia dan memenuhi persyaratan
pada saat diangkat dan selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama -----

menjabat: -----

1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah -----
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; -----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang -----
berkaitan dengan sektor keuangan; dan -----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota --
Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ----
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak ----
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak
memenuhi kewajiban menyampaikan laporan -----
tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-----
undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang -----

dibutuhkan Perseroan. -----

4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, -----
anggota Direksi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -
5. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam -----
surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. -----
6. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.-----
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -----
Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----
10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. -----
Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) pada akhir 1 (satu) periode masa
jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan

- tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, ----- dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
11. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat ----- kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu --- dengan menyebutkan alasannya. -----
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada - Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak -- lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain - melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan -- lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah---- yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.-----
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan- dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian- tersebut.-----
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang -- ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
 13. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---- sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----

- permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender --
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -----
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat -----
2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam huruf b ayat ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----
tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -----
sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan-----
hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara --
waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a -----
diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan. -----

- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----- sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan ----- Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus ----- diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan ----- puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS----- sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat---- mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana----- dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal. -----
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. -----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana----- dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang: -----
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan ----- Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan ----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan ----- Komisaris sampai dengan: -----
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan ----- pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ----- huruf c ; atau -----

- b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d. -----
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ---
maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya. -----
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----
membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----
- k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat
dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan mengenai:-----
- (a) keputusan pemberhentian sementara, dan-----
- (b) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat 10 huruf c Pasal ini atau informasi mengenai batalnya -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak -
terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf e Pasal ini;--
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut
15. RUPS dapat: -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi
yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----

- suatu lowongan; atau -----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru.-----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota -----
 Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan -----
 diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
 Direktur yang diberhentikan/atau digantikan tersebut dan masa jabatan
 dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa --
 jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -
 ditentukan lain dalam RUPS. -----
16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----
 anggota Direksi tersebut: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
 dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----
 17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi -----
 ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
 dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
 18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----
 apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) -
 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka -----
 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan
 itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal. -----

19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban ---
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama. -----

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan -----
dalam Pasal 19 ayat 12 Anggaran Dasar ini. -----

20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik -----
secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain --
penghasilan yang sah. -----

21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan ----
serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 16** -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam ---
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ----
dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat -----
Umum Pemegang Saham. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
Pasal ini, maka: -----
- a. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan -----
Perseroan yang meliputi; -----
1. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----
Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau----
beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan
mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili -----
Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan -----
di dalam atau di luar negeri; -----
 2. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan -----
penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham; -----
 3. mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
 4. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan; -----
 5. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai -----
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ----
Perseroan dengan pihak lain dan/atauatau pihak lain dengan -----

Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan -----
pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan ----
perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

- 1). mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -----
usahanya; -----
- 2). menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perseroan,-----
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, dan perubahannya serta---
menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ----
persetujuan dari Dewan Komisaris; -----
- 3). memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai -----
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perseroan; -----
- 4). membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah ---
Rapat Direksi; -----
- 5). membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban -----
pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen ----
Perusahaan; -----
- 6). menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi -----
Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit; ----

- 7). menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ----
kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk disetujui dan -----
disahkan; -----
- 8). memberikan penjelasan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ----
mengenai Laporan Tahunan; -----
- 9). menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham kepada Menteri yang membidangi
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; -----
- 10).memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan -----
Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini,
dan dokumen Perseroan lainnya; -----
- 11).menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang ----
Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, ----
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan
Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada huruf b butir 4 dan 5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 11) ayat ini; -----
- 12).menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi ----
Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, -----
terutama pemisahan fungsi manajemen, pencatatan, penyimpanan --
dan pengawasan; -----

- 13).memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; -----
 - 14).menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan ----- perincian dan tugasnya; -----
 - 15).memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris;-----
 - 16).menyusun dan menetapkan struktur organisasi Perseroan; -----
 - 17).menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh ---- Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, ----- pikiran, perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, ----- kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan; -----
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi ----- Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta ---- wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, ----- transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta ----- kewajaran; -----
 5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung ---- jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan ----- dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan --
 RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
 perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
7. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab -
 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung
 jawab, dan kehati-hatian.-----
8. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
 jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk ---
 komite.-----
9. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 8, Direksi -
 wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ----
 buku. -----
10. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh
 anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -----
 karyawan/atau pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki -----
 Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----
 berlaku. -----
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung -----
 renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ---
 kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini, apabila dapat -- membuktikan: -----
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung ----- jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan ----- maksud dan tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; -- dan -----
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya -- kerugian tersebut. -----
13. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di ----- dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -- Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ----- kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 14 pasal ini. -----
14. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ----- Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang----- undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk: -----
- a. mendapatkan/atau membeli/atau memperoleh dan/atau ----- melepaskan/atau menjual/atau mengalihkan dan/atau menyewakan ---- dan/atau menggadaikan (menjadikan jaminan) barang tidak bergerak,

- termasuk hak-hak atas tanah/atau bangunan milik Perseroan, dengan nilai 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan;-----
- b. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), dengan nilai 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan. -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang mempunyai akibat keuangan dengan nilai 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan; -----
- d. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dengan nilai 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan. -----
15. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat 14 Pasal ini.---
16. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi -----

- pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -
 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat --
 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (3) ---
 Anggaran Dasar ini. -----
17. Perbuatan hukum: -----
- untuk melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha dan dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---
 - untuk melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan----- tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
18. a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang Direktur lainnya ----- berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab -- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka 2----- (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
19. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan - wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----- Rapat Direksi. -----

20. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka ----- Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai - kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota ----- Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan ----- Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----- Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas. -----
21. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:-----
- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ---- berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
22. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 20, yang berhak mewakili Perseroan adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-- dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai -- benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi--
 - d. atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan ----- Perseroan.-----

23. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur ---- dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:-----
 - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ----- Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1----- (satu) kali dalam setiap bulan dan Direksi wajib mengadakan rapat Direksi - bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali ----- -dalam 4 (empat) bulan.-----
3. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilangsungkan,-- sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam Rapat. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.-----

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, --
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----
kalender sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah---
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan ----
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak ----
mewakili Direksi. -----

Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana -----
apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota --
Direksi paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat diadakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal -----
Rapat. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan -----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu
dan tempat Rapat. -----
10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau-----
di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat
di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia. -----
11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. -----

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk -----

- menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi ----
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin-----
Rapat Direksi.-----
12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -----
oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-----
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun -----
baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai ----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi -----
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----
14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 1 dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan----
keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari
1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir. -----

16. Perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam keputusan--
Rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi --
disertai alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) tersebut.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam -
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.-----
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam---
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi----
dan anggota Dewan Komisaris. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ---
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat-
17 dan ayat 18 , yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 -----
wajib didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-----
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik -----
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa ---
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----

menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----
Direksi.-----

23. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video ----
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan -----
semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara ---
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan -----
bahwa berita acara dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi ----
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan ----
diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi -----
dalam rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara --
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang -----
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

24. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam anggaran -----
dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang-----
terdiri dari :-----
- 1 (satu) orang Komisaris Utama; -----
- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih; -----
atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan -----

- memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan ---
Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. -----
 3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota -----
Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang -----
30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
 4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri -----
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
 5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan -----
selama menjabat: -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:-----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -----
perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -----
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang selama menjabat: -----

- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah ----- tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota---- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada---- RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak ---- memenuhi kewajiban menyampaikan laporan ----- tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;---- dan-----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan ----- Perseroan. -----
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, ----- anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 -- dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris ----- Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. -----
 8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.-----
 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan

- didokumentasikan oleh Perseroan. -----
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib -----
dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.-----
 11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana -----
dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian
anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi -----
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. -----
 13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota -----
Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. -----
 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan -----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) ----
periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan -----
tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota -----
Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini. -----
 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-----
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----

- sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan -----
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan -----
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya ----
yang dinilai tepat oleh RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut -----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri ----
dalam RUPS. -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan ----
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian----
tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya ----
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) ---
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----

- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja ----- setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil ----- penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.--
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris ---- yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----- tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan - perundang-undangan yang berlaku. -----
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ----- sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan ----- pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya ----- pengunduran dirinya dalam RUPS.-----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan ----- membebaskannya.-----
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, ----- apabila anggota Dewan Komisaris tersebut: -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. -----

19. Honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris -----
ditetapkan oleh RUPS. -----
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga ----
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) -----
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus --
diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari -----
kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya -----
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan
menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai -----
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. ---
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan -----
pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan -----
Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
23. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta ----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 19**-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai -----

Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap ----- pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan -- Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan----- Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan---- yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. -----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 -----
Pasal ini, maka: -----

- a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----
 1. melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen -----
lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi, dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
 2. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang -----
dipergunakan oleh Perseroan; -----
 3. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya ----
mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan --
Perseroan; -----
 4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan ----
akan dijalankan oleh Direksi; -----
 5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi -----
dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan
Komisaris; -----

6. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan -----
Komisaris jika dianggap perlu; -----
 7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan --
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----
 8. membentuk Komite-Komite selain Komite Audit jika dianggap
perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan; -----
 9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka
waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu; -----
 10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan ----
tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundnagan yang berlaku; -
 11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-----
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; -----
 12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
Anggaran Dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----
- b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----
1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan
pengurusan Perseroan; -----
 2. meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana -----
Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini; -----

3. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan ----- Tahunan; -----
4. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat---- Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, ----- apabila diminta; -----
5. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam----- Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; -----
6. Membentuk Komite Audit; -----
7. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham; -----
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan----- salinannya; -----
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan ----- sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; -----
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham; -----
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas ----- pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak ----- bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ----- Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
 - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
6. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 8 setiap akhir tahun buku.
7. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku --

bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, -----
karyawan/atau pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ----
berlaku. -----

23. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara -----
tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan
tugasnya.-----

24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas -----
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, -----
apabila dapat membuktikan: -----

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung -----
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak-
langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; --
dan -----
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut. -----

25. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak-
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan---
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua--
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---

- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala---
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
26. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi -----
tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib -----
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh --
Dewan Komisaris. -----
27. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila ---
karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota--
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----
28. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas---
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----
29. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----
dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam
anggaran dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
30. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 14 menjadi bagian
dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam -----

Peraturan OJK. -----

31. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam -----
anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK dan ketentuan serta ----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana-----
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ----
atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu)
Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu -----
per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ---
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali --
dalam 2 (dua) bulan. -----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat -----
dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota -----
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara -----
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan. -----
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ---

dalam ayat 1.b dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya --
tahun buku. -----

6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 5,
bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----
sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan
kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. ----
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga,-----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak ----
dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun ---
dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para ----
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender -----
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ----
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari ----
kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan -
oleh Komisaris Utama. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka -----
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. -----
10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----

- dan tempat Rapat. -----
11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ----
di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan, atau ditempat lain asal saja dalam ---
wilayah Republik Indonesia.-----
 12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -----
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, ----
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh -
dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat -----
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -
surat kuasa.-----
 14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris --
lainnya yang diwakilinya.-----
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara -----
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya --
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
15. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
16. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat 15, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan --
suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota --
Dewan Komisaris yang hadir.-----
17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam -
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris -----
yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.--
18. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ----
Komisaris dan anggota Direksi. -----
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
17 dan ayat 18, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. -----
20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 wajib ----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 -----

merupakan bukti yang sah mengenai keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para ----- anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah--- dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan -- secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota - Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ---- yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---- Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21**-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan ----- Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan -- tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan ----- keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.-----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi ----
menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung---
sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
 7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku -----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai -----
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. --
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan -----
harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam ----
laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan -----
tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah -----
menyetujui isi laporan tahunan.-----
 9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/atau Rugi ----
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional -----
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal. ----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ----- keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran --- dividen.-----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama --- siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----- memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh -- atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ---- dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari ---- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ----- dicatatkan.-----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----- laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ---- UUPT dan Anggaran Dasar ini dapat dibagi sebagai dividen.-----
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang ----- memutuskan pembagian dividen tunai. -----

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama----- kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup----- seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -- ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam----- cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang -- telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-- tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak--- Perseroan. -----
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ----- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan.-----

-----**PENGGUNAAN CADANGAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun - buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan--- peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan- mempunyai laba yang positif.-----

3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan -----
mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor Perseroan.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang --
tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari ----
jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan untuk keperluan -----
Perseroan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau
peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam
Bahasa Indonesia.-----
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan---
nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan -----
tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya
Modal Dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau -
perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau
sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak -----

Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya sebagaimana ----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut
dalam ayat 3 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam UUPT. -----
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

----- **DAN PEMISAHAN**-----

----- **Pasal 25**-----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ----
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ----
ayat 2 butir (3) Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----
Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud -----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----**PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA**-----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

----- **Pasal 26**-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 ---
butir (3) Anggaran Dasar ini. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya ----- status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang ----- undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----**TEMPAT TINGGAL**-----

-----**Pasal 27**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap --- bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar ----- Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan---- yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.-----
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran ----- dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ----- menerangkan:-----

-Bahwa Perseroan telah berpindah domisili, yang semula beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II #28#01 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman ----- Kaveling 52-53, Jakarta Selatan 12190, menjadi di Noble House Lantai 36 # 01, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.4.2 Nomor 2, Mega ----- Kuningan, Jakarta Selatan 12950, yang merupakan wilayah Kuningan Timur;----